



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024
DAN PERSIAPAN PILKADA SERENTAK 2024
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN
TANGGAL 4 – 6 JUNI 2024**

Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2024 Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 ke Kantor Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan Kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Dr. Junimart Girsang dan diterima oleh PJ. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakhrulloh, didampingi para staf Pemprov Sulawesi Selatan. Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan di kantor Gubernur Pemprov Sulawesi Selatan, yang juga dihadiri oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Kodam XIV Hasanuddin, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan rapat tersebut, juga didampingi oleh pejabat dari Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI.

Tujuan kunjungan kerja spesifik tersebut adalah untuk melihat langsung kesiapan dan persiapan penyelenggara Pilkada di daerah dalam melaksanakan tahapan Pilkada khususnya tahapan yang saat ini sedang berjalan, disamping itu juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara Pilkada Serentak Tahun 2024 dalam upaya menyukseskan agenda besar nasional.

Dalam pemaparannya Pimpinan Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Penyelenggaraan Pilkada serentak tentu diharapkan menjadi momentum penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI menilai penting untuk mengawal persiapan dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak untuk memastikan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar, berkualitas, transparan, adil, aman, serta hak-hak peserta pilkada dan hak – hak masyarakat terjamin dengan baik. Pada Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI ingin mengetahui realisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), distribusi blanko KTP-el, serta fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Sulawesi Selatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk pendataan penduduk, pemutakhiran data pemilih serta pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah melaporkan terkait anggaran pelaksanaan Pilkada, dana hibah dari Pemprov Sulsel sebesar Rp387 miliar. Ini dialokasikan pada honorarium pemilihan, kemudian tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini terdapat dana sharing kepada kabupaten dan kota, 50 persen ke provinsi dan 50 persen ke kabupaten dan kota. Paling besar dana sharing ke Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Langkah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel, untuk proses tahapan Pilkada telah dua kali difasilitasi oleh Pemprov dalam kegiatan rapat pemantapan pemilihan kepala daerah dengan mengundang Forkopimda se Sulsel dan kabupaten/kota.

Prinsipnya dalam paparan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Penyelenggara Pemilu, POLRI/TNI dan Kejati Provinsi Sulawesi Selatan tentang Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 berkomitmen menjaga netralitas PNS/ASN dalam menyelenggarakan pelaksanaan pilkada serentak, profesional, adil, dan aman.

Memahami betapa kompleksnya tugas yang diemban oleh penyelenggara pemilu, baik dari sisi teknis maupun pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaannya, Ketua Komisi II DPR RI dalam pengantar akhirnya mengajak seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan, KPU, Bawaslu, Gakkumdu di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap solid melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggungjawab agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar, damai, aman dan kondusif. Disamping itu, tentu saja dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah NKRI.

Makassar, 4 Juni 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI.